

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi menjadi kecenderungan yang menggejala di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Hampir tiga dasawarsa terakhir, kehidupan sosial politik di Indonesia diwarnai wacana demokrasi. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang intern maupun ekstern. Faktor internnya adalah bahwa masyarakat telah berupaya membangun kesadaran demokrasi melalui berbagai aktivitas misalnya, melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), diskusi/seminar yang diselenggarakan di berbagai perguruan tinggi dan sebagainya. Adapun faktor eksternnya antara lain adalah proses “pemasungan” demokrasi yang dilakukan secara sistemik oleh rezim terdahulu yang akhirnya melahirkan pemberontakan-pemberontakan, baik di tingkat wacana maupun dalam bentuk gerakan sosial dan politik. Kedua faktor di atas telah berjalan sekian lama secara dialektis dan menuai hasil - meskipun belum sepenuhnya berhasil - dengan tumbangannya rezim orde baru.

Secara lebih khusus, Robinson memberikan penjelasan terhadap munculnya gerakan demokratisasi di negara-negara industri baru di Asia Timur dan Tenggara. Robinson mengemukakan bahwa pengalaman berbagai negara industri baru di Asia Timur dan Tenggara itu memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu:¹

¹ Mohtar Mas' oed, *Negara Kapital dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hal. 30

1. Perkembangan kapitalisme secara cepat di Asia, telah menciptakan kelas-kelas pemilik kapital (modal) baru yang pada mulanya sangat rentan dan perkembangan ini didukung oleh negara yang otoriter.
2. Negara-negara otoriter, pada awalnya cocok untuk menjalankan fungsi-fungsi politik dan ekonomi yang esensial bagi pertumbuhan kapitalisme, yaitu menjamin tidak terjadinya revolusi sosial, investasi dalam industri berat, kredit murah dan proteksi tarif bagi kapitalis.
3. Berkembangnya kelas menengah dan kelas pemilik kapital (modal) dengan sumber-sumber kekuatan politik yang cukup besar.
4. Transformasi struktural yang terjadi diperkuat oleh tekanan-tekanan internasional ketika negara itu semakin terintegrasi ke dalam pembagian kerja internasional dan memasuki tahap industrialisasi berorientasi ekspor. Menurut pemikiran ini, rezim demokratis merupakan salah satu jalan untuk membuka pasar domestik yang di bawah rezim otoriter tidak bebas untuk dimasuki barang-barang dan jasa dari luar negeri.
5. Faktor yang juga mendukung proses ini adalah melemahnya negara-negara otoriter akibat dari krisis ekonomi yang beruntun. Defisit neraca pembayaran yang semakin besar, hutang luar negeri, inflasi dan krisis fiskal mendorong negara-negara itu untuk menyerahkan tanggung jawab pembangunan ekonomi kepada borjuis (masyarakat kaya) kota. Demokrasi merupakan salah satu cara mengajak pihak-pihak lain untuk menanggung beban tanggung jawab dan menghindari mobilisasi ketidakpuasan masyarakat.

demokrasi yang baru seumur jagung ini belum dipahami dan dipraktikkan secara nyata, baru sebatas utopia belaka. Demokrasi selamanya memerlukan kompi-kompi demokrat dalam teori dan praktik.

Dalam kaitan ini, perlu dipahami dengan seksama bahwa demokrasi bukanlah sebuah wacana, pola pikir atau perilaku politik yang dapat dibangun sekali jadi (instan). Demokrasi adalah proses yang masyarakat dan negara berperan di dalamnya untuk membangun kultur dan sistem kehidupan guna menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Dengan kata lain, berbicara demokrasi adalah juga berbicara tentang mentalitas bangsa. Ditinjau dari sudut tersebut maka, demokrasi dapat tercipta bila masyarakat membangun kesadaran sendiri tentang pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berhegara. Sebaliknya negara (pemerintah) sebagai instrumen politik dan ekonomi suatu bangsa juga harus memiliki *political will* untuk mendukung terwujudnya demokrasi. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan-kebijakan diberbagai aspek.

Setelah berakhirnya perang Dunia II, banyak negara-negara baru yang bermunculan (baca: merdeka). Negara-negara tersebut kebanyakan berasal dari benua Amerika, Afrika dan Asia yang kemudian pada gilirannya disebut sebagai kelompok negara dunia ke-tiga (negara berkembang/miskin). Salah satu faktor yang memberikan kesempatan bagi munculnya negara-negara baru tersebut adalah karena melemahnya kekuatan negara-negara Eropa untuk tetap mempertahankan koloninya sebagai akibat buruk dari perang yang membutuhkan biaya sangat besar yang akhirnya mengakibatkan keterpurukan ekonomi yang luar biasa.

Dalam melaksanakan proses pembangunan, banyak dari negara-negara baru tersebut kemudian beralih dari sistem ekonomi kolonial-tradisional ke arah sistem ekonomi yang lebih terbuka (baca: liberal), yaitu kapitalisme. Dengan terintegrasinya sistem ekonomi negara-negara berkembang ke dalam sistem ekonomi kapitalisme, maka secara tidak langsung negara-negara tersebut akan dan telah mengadopsi paradigma pembangunan ekonomi yang parameter utamanya adalah pertumbuhan dan pembangunan itu sendiri. Transformasi industri melalui pembangunan besar-besaran yang membawa kandungan nilai dan budaya Barat, selanjutnya banyak sekali merombak tatanan sistem sosial budaya dan ekonomi masyarakat dunia ke-tiga.

Kapitalisme yang lahir dari perekonomian liberal, sepertinya telah mendominasi dan menjadi aktor utama dalam pentas dunia saat ini. Semua itu tidak lain karena kemampuan kapitalisme dalam menciptakan “keajaiban” berupa perubahan dan perbaikan ekonomi di negara-negara maju yang tentu saja hal tersebut merangsang keinginan negara-negara dunia ke-tiga untuk mengikutinya. Apalagi bagi negara-negara dunia ke-tiga yang sangat rentan akan disintegrasi dan konflik, “keajaiban” berupa perubahan dan perbaikan yang telah diperlihatkan oleh kapitalisme diharapkan akan mampu meredakan/mengatasi semua persoalan itu.

Era perdagangan bebas yang akan dihadapi oleh setiap negara di dunia, pada sisi ideologis merupakan momentum bagi kapitalisme dan liberalisme menemukan kemenangannya atas paham sosialisme-komunisme. Gejala tersebut sebenarnya telah muncul pada era 1950-an dan 1960-an. Namun baru pada era

1980-an lah posisi kapitalisme kian kokoh serta memperlihatkan kontradiksinya dengan apa yang telah dicapai oleh negara-negara sosialis-komunis. Negara-negara sosialis-komunis di Eropa Timur dan tentu saja Uni Soviet, semakin menanggung beban untuk pada satu sisi mempertahankan keyakinan ide-ide mereka tentang kemakmuran dan di sisi lain, negara-negara tersebut harus membuktikan ideologi yang mereka anut sebagai anti-tesis ide-ide kapitalis seperti cita-cita epistemologinya.²

Jatuhnya rezim di Eropa Timur pada penghujung tahun 1989 adalah kejadian yang memberikan pengaruh penting bagi rentetan peristiwa serupa selanjutnya, yaitu berjatuhnya satu demi satu negara-negara sosialis-komunis. Kehancuran Uni Soviet sebagai simbolisasi rezim komunisme menyebabkan susutnya kepercayaan terhadap sosialisme. Fenomena ini menjadikan dunia menempatkan kapitalisme sebagai bagian penting dalam setiap pembahasan dan perdebatan persoalan ekonomi. Perekonomian dunia menjadi satu kekuatan integral yang tidak terpisahkan dalam satu atap ideologi, yakni kapitalisme.

Indonesia, sebagai salah satu negara dunia ke-tiga (negara berkembang/miskin), juga menggunakan sistem pasar yang lebih terbuka guna memacu pertumbuhan ekonominya. Setelah pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru (1966) yang kemudian secara resmi dilantik oleh MPRS pada

² Menurut faham sosialis-komunis, masyarakat Barat telah berkembang dialektik melalui beberapa tahap, yaitu masyarakat perbudakan, masyarakat feodal dan masyarakat kapitalis. Masyarakat kapitalis dalam perspektif marxis adalah gerakan dialektik terakhir, karena dalam masyarakat ini akan terjadi kontradiksi antara masyarakat dua kelas, yakni mereka yang memiliki alat-alat produksi dan modal (kaum kapitalis) dengan mereka yang hanya memiliki tenaga (kaum proletar / buruh). Krisis internal itulah yang akan menghancurkan sistem kapitalisme. Ini juga sekaligus menjadi awal bagi berkembangnya masyarakat tanpa kelas, yakni komunisme. Lihat Miriam Budiarto, *Simposium Kapitalisme, Sosialisme dan Demokrasi*, Gramedia, Jakarta, 1984, hal. 12

bulan Maret 1967, Indonesia mulai membangun perekonomiannya dengan mendatangkan (mengundang) investasi asing, karena pada masa pemerintahan sebelumnya, perekonomian negara dalam keadaan krisis. Kondisi ekonomi Indonesia sendiri pada masa awal pemerintahan orde baru, mengalami inflasi sekitar 20-30% sebulan, GNP perkapitanya US \$ 80, sedangkan hutang luar negeri sebesar US \$ 2,2 milyar.³

Penguasa Orde Baru merumuskan dua tujuan utama yaitu, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Suatu negara yang hidup dalam kemiskinan, rentan terhadap gangguan dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu diperlukan *security approach* untuk melindungi rakyat Indonesia dan kemerdekaan yang diperolehnya. Disamping itu, dibutuhkan pula *prosperity approach* agar rakyat mampu memperbaiki taraf hidupnya sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Secara historis, *developmentalisme* (pembangunanisme) bisa kita temukan bergandengan dengan kapitalisme. Maka tidak terlalu mengherankan jika *developmentalisme* sendiri dari awal kemunculannya sangat sarat dengan kandungan nilai-nilai kapitalisme (*capitalism values*). Kapitalisme, dengan gaya khasnya mencoba menawarkan diri dalam bentuk lain yang lebih lunak agar bisa dipahami oleh siapa saja. Karenanya, menganggap bahwa *developmentalisme* adalah bungkus baru dari kue lama kapitalisme bisa diletakkan sebagai dasar dalam mengkaji strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ke-tiga, termasuk Indonesia. Investasi asing sendiri pada awalnya hanya dijadikan pelengkap dalam pembangunan, sebelum akhirnya menjadi hal

³ Yahya A Muhaimin, *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1960*, LP3ES, Jakarta, 1991, hal. 51

yang utama/pokok untuk menjalankan pembangunan. Maka, pada saat itulah sebenarnya sistem kapitalisme mulai diterapkan.

Kebijakan tersebut mulai menampakkan keberhasilan yang ditunjukkan dalam Repelita I (rencana pembangunan lima tahun I) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,4% pertahun, sehingga kemudian pemerintah mencanangkan Repelita II (mulai 1 April 1974) yang mencakup program untuk memperluas lapangan kerja, distribusi penghasilan yang lebih merata, memperbaiki struktur pasar, meningkatkan pembangunan daerah, meningkatkan mutu pendidikan dan segi non ekonomis lainnya. Melalui program Repelita tersebut, roda perekonomian Indonesia secara signifikan mengalami peningkatan, sehingga dianggap menjadi salah satu yang terbaik bukan saja di Asia Tenggara namun juga di Asia.

Akan tetapi, kebijakan ekonomi kapitalis yang ditandai dengan masuknya modal asing disertai dengan berbagai kebijakan ekonomi kapitalis yang lain, ternyata tidak diikuti oleh kebebasan politik. Pada masa Soeharto, politik telah dengan semena-mena digunakan untuk dapat mempertegas kedudukannya sebagai penguasa tunggal di negeri ini. Ketertutupan politik telah melahirkan persekongkolan berupa Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang luas dan melembaga. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada kelompok di tengah-tengah masyarakat yang bebas dari KKN. Lebih parah lagi, krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia (Juli 1997), telah menghadapi kondisi perekonomian Indonesia pada masalah yang baru. Krisis tersebut ditandai dengan jatuhnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar Amerika, dari Rp. 2.500 hingga level Rp. 5.072 per US \$ (26 Desember 1997). Bahkan menjadi Rp. 10.500

Harapan atau dugaan itulah yang kemudian membentuk suatu peranan, sehingga peranan seorang aktor politik sangat tergantung dari harapan atau dugaan yang muncul. Jelasnya, peranan atau *role* adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu.

Menurut John Wahlke,⁶ teori ini memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. *Pertama*, teori ini menunjukkan bahwa aktor politik pada umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Kerangka berpikir teori peranan memandang individu sebagai seseorang yang tergantung dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. *Kedua*, teori ini mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara *behavioral*. Dengan kata lain, institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai tujuan.

Menurut Alan Isaak, harapan terhadap individu yang menduduki posisi itu bisa muncul dari dua jenis sumber. *Pertama*, harapan itu bisa berasal dari orang lain terhadap aktor politik, namun bisa juga berasal dari aktor politik itu sendiri. Aktor politik itu sendiri mungkin punya persepsi tentang apa yang diharapkan orang lain dari dirinya. Oleh karena itu, jenis sumber pengaruh pertama yang disebut dalam peran adalah hubungan antara harapan orang lain terhadap pemegang peran dengan persepsi si pemegang peran terhadap hal tersebut. *Kedua*, harapan itu bisa muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peran yang dipegangnya, yaitu harapan sendiri tentang apa yang harus dan apa

⁶ *Ibid*, hal. 45

yang tidak boleh dilakukan dan tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Harapan yang berasal dari dalam ini biasanya akan menjadi gagasan bagi sang aktor. Sebagian besar gagasan ini biasanya mencerminkan sikap, ideologi dan kepribadian yang dikembangkan sebelum memegang peranan yang dimainkan, akan tetapi terkadang gagasan dari luar dapat mempengaruhi gagasan sang aktor.

Berkaitan dengan adanya pengaruh dari luar tersebut, dalam teori peranan dijelaskan pula adanya hubungan antar peranan. Oleh karena itu, dikenal pula konsep "jaringan antar peranan". Akibatnya muncullah suatu pola hubungan yang cukup rumit, dimana suatu peranan memiliki kaitan dan dipengaruhi oleh peranan yang lain. Implikasinya, akan timbul suatu keadaan dimana terjadi tawar-menawar antar aktor.

Disamping itu, akan digunakan juga sebuah teori, yaitu **interlocking fates theory** yang dipelopori oleh Raymond F Hopkins dan Richard W Mansbach. Dalam teori ini dijelaskan bahwa dua aktor memiliki nasib yang saling bertaut/terkait ketika konsekuensi-konsekuensi dari perilaku mereka berada dalam kondisi sedemikian rupa, sehingga agar satu aktor bisa mencapai tujuannya, maka diperlukan suatu tindakan oleh aktor lainnya. Dengan demikian, pilihan dari satu aktor untuk mempengaruhi situasi atau juga kadang-kadang kebijakan dari aktor lainnya adalah merupakan keniscayaan.⁷

Jauh sebelum konsep *nation-state* lahir di Eropa, sebenarnya interaksi antar wilayah itu sudah terjadi. Bila hubungan pada saat itu hanya sebatas pada permintaan dan penawaran akan sebuah barang, maka pada perkembangan

⁷ Raymond F Hopokins dan Richard Mansbach, *Structure and Process in International Politics*, Harper and Row Inc, Newyork, 1973, Bab. V, hal. 100

Ketika mulai didirikan, rezim Orde Baru mendapat sokongan kuat dari negara-negara Barat berupa bantuan keuangan dan program dalam usaha pembangunan Indonesia. Dalam perhitungan politis, dirangkulnya Indonesia ke dalam pengaruh negara Barat adalah dalam rangka menjaga sebuah negara yang baru saja lepas dari pengaruh komunisme yang berarti menjaga kelangsungan kepentingan Barat di Indonesia khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya. Dalam perhitungan ekonomis, Indonesia dipandang sebagai negara potensial yang diharapkan akan memberi keuntungan ekonomis kepada negara-negara Barat.

Tidak bisa dipungkiri, rezim orde baru mampu melipat gandakan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembangunan yang mendapatkan pengawalan ketat militer dapat dengan berjalan mulus tanpa hambatan yang berarti. Melalui investasi-investasi yang ditanamkan di Indonesia dan bekerjasama dengan borjuisi lokal, negara-negara Barat menjalankan aksi ekonominya yang mendapat penjagaan/pengawalan otoritarianisme negara dari aksi-aksi revolusioner, gerakan buruh maupun suara-suara minor kaum nasionalis yang menghendaki peranan masyarakat pribumi yang lebih besar. Otoritarianisme negara, pada awalnya mungkin memang diperlukan guna menciptakan stabilitas politik dan keamanan bagi sebuah negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Namun, dalam perkembangannya rezim orde baru menggunakan otoritarianisme negara, sebagai alat/cara untuk mempertahankan kekuasaan. Kontrol negara yang sangat besar dan berlebihan, tidak memberikan kebebasan kepada daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahannya sendiri, karena mendapat dikte dari pemerintah pusat. Cara seperti ini kemudian menumbuhkan model paternalisme (sistem kebapakan) yang

hanya menguntungkan bagi mereka yang berada di sekitar kekuasaan. Kunci utama sebagai pengambil keputusan ekonomi dan politik, terletak di tangan Soeharto sebagai pengambil kebijakan tertinggi dengan adanya kekuasaan politik yang memusat pada puncak piramida politik. Masuknya militer dalam pemerintahan dan sektor-sektor yang bukan menjadi bidang profesional mereka, juga disinyalir sebagai salah satu bentuk penguatan kekuasaan untuk memperkuat dan mempertahankannya.

Namun kemudian, berbagai tekanan politis dari dalam negeri yang dibarengi tekanan-tekanan ekonomis yang bermunculan, mempunyai dampak politis dari perekonomian global. Ekonomi global menghendaki profesionalisme dan dipihak lain, negara otoriter semakin lama dianggap semakin usang. Karena tekanan-tekanan tersebut, pemerintah Indonesia sejak pertengahan 1980-an (setelah era "booming" harga minyak) memberlakukan paket-paket deregulasi ekonomi yang memberi kelonggaran-kelonggaran atas bidang usaha yang sebelumnya dikenai pembatasan. Deregulasi diumumkan pemerintah Indonesia setiap tahun dan biasanya waktu pengumumannya disesuaikan dengan waktu diadakannya sidang negara-negara donor yang akan menyalurkan bantuannya kepada Indonesia. Tetapi deregulasi-deregulasi yang diluncurkan pemerintah lebih menyentuh kalangan profesional saja. Pengelolaan dan penguasaan ekonomi masih tetap di tangan para konglomerat yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Disamping itu, negara juga masih mengendalikan operasionalisasi pasar. Bulog memonopoli bahan kebutuhan pokok dan berkuasa penuh dalam menentukan importir dan eksportir yang menjadi mitranya. Penguasaan pasar dan pembatasan

akses kegiatan ekonomi bertentangan dengan globalisasi yang menghendaki perdagangan bebas internasional.

Lebih parah lagi, keterlibatan bisnis keluarga pejabat tidak disertakan dengan kemampuan berwira-usaha tetapi karena lebih didukung oleh fasilitas negara. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia berdiri di atas fondasi yang rapuh. Ia lebih banyak didukung oleh bantuan modal asing daripada ditopang oleh keikutsertaan perekonomian rakyat. Kerapuhan fundamental ekonomi Indonesia menjalar menjadi persoalan yang lebih mendasar, yaitu ketidakpercayaan terhadap rezim yang berkuasa apalagi terdapat ketidakpastian stabilitas politik. Stabilitas politik yang tidak menentu membawa kekhawatiran akan masa depan aktifitas ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh, modal lari ke luar negeri, hutang negara semakin besar dan pada akhirnya, Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan pada 21 Mei 1998 yang membawa bangunan "Negara Otoriter Birokratik" milik orde baru menuju jurang kehancuran.

D. Hipotesa

IMF melalui program-programnya yang tertuang dalam *Letter of Intent* (LoI) dan telah disepakati dengan pemerintah Indonesia telah memberikan pengaruh terhadap proses demokratisasi di Indonesia.

E. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan pandangan yang menyeluruh dalam mencermati perkembangan demokratisasi di Indonesia,

sehingga dapat memberikan informasi, pengetahuan dan pendidikan demokrasi terhadap masyarakat secara luas dan transparan. Disamping itu, penulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang studi strata-1 (S1) jurusan ilmu hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metode Pengumpulan Data

Proses penulisan dilakukan dengan metode deduktif yang berdasarkan kerangka teori ditarik suatu hipotesa yang didukung dengan data-data. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang diolah adalah data sekunder yang bersumber dari buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal maupun internet.

G. Jangkauan Penulisan

Agar pembahasan tidak meluas dan berlarut-larut serta penjelasan masalah menjadi konkrit, maka penulisan perlu diberi sebuah batasan. Jangkauan penulisan adalah sejak tahun 1997 sebagai awal krisis ekonomi yang disertai dengan munculnya gerakan reformasi sampai dengan tahun 2003 pada saat berakhirnya hubungan IMF dengan pemerintah Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri atas lima bab yang masing-masing bab akan menengahkan dan membahas persoalan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya termuat unsur-unsur metodologis yang memang harus dipenuhi dalam sebuah penulisan ilmiah. Pada bagian ini diuraikan alasan pemilihan judul, latar belakang persoalan yang diangkat, pokok persoalan yang ingin dikemukakan, kerangka teoritis yang digunakan dan hipotesa yang ditawarkan. Selain itu, juga terdapat metode / teknik pengumpulan data yang digunakan serta jangkauan penulisan yang ingin ditelaah. Bab ini merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi kajian.

Bab kedua akan mengetengahkan tentang orde baru, yaitu mulai dari awal terbentuknya orde baru, karakteristik orde baru sampai pada akhir/tumbanganya orde baru.

Bab ketiga akan membicarakan tentang reformasi sebagai era keterbukaan dan demokratisasi. Bab ini akan mengungkap dan menjelaskan bagaimana gerakan reformasi dimulai yang akhirnya menciptakan momentum bagi demokratisasi di Indonesia.

Bab keempat akan menceritakan tentang keberadaan IMF di Indonesia, program-program IMF dalam *Letter of Intent* serta peranan IMF dalam membantu krisis yang terjadi di Indonesia.

Bab kelima adalah kesimpulan. Bab ini, selain merupakan rangkuman pada bab-bab sebelumnya, juga berisi penegasan argumen-argumen yang disampaikan.